

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari Strategi Komunikasi Partisipatif yang telah peniliti lakukan dengan teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas dengan menggunakan empat klaim yaitu klaim kebenaran, klaim ketetapan, klaim kejelasan, dan klaim komprehensibilitas, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Komunikasi Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh Dinsospermades Kabupaten Banyumas dengan Klaim Teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas:
 - a. Klaim Kebenaran (Truth)

Klaim kebenaran menurut Habermas merupakan klaim yang berkaitan pada keobjektifan dunia alamiah. Klaim ini berkaitan dengan pernyataan yang diucapkan oleh komunikator kepada seseorang sesuai dengan kenyataan. Dinsospermades Kabupaten Banyumas dalam menyusun dan melaksanakan program mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat. Salah satu bentuk yang dilakukan Dinas dalam pelaksanaan program yaitu melibatkan professional atau ahli dalam bidang tertentu didalam program sebagai narasumber dan pemateri, dengan tujuan agar apa yang disampaikan dapat dipercaya sesuai dengan keilmuan serta kebutuhan masyarakat. Dinas berupaya untuk memastikan materi yang disampaikan sesuai dengan dasar keilmuan yang jelas.

Dinsospermades Kabupaten Banyumas dalam program yang disusun dan direncakan menggunakan sistem bank data yang berisikan potensi dan karakteristik dari wilayah yang dituju untuk program. Dinas memilih wilayah yang akan dilaksanakan program sesuai dengan bank data agar tidak secara asumsi semata, melainkan realitas dari setiap

desa. Bank data ini juga berisikan tentang aspirasi yang sudah ditampung oleh Dinas untuk dipertimbangkan untuk program yang akan diadakan. Hal ini menjadi salah satu bentuk komunikasi yang dijalankan dari bawah ke atas atau dari aduan masyarakat yang dikumpulkan oleh pihak Dinas.

Setelah Dinas menggunakan bank data sebagai salah satu sistem untuk mengidentifikasi karakteristik wilayah, Dinas berupaya untuk mengonfirmasi ulang dan berkoordinasi kepada pemerintah desa ataupun masyarakat. Dalam beberapa kasus, jika tidak sesuai dengan keadaan dan karakteristik dari wilayah tersebut, maka dilakukan penyesuaian dengan berbentuk koordinasi ulang agar mencapai tujuan bersama.

Setelah penyusunan dan pelaksanaan program, Dinas memerlukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang dijalankan. Bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas yaitu berbentuk pengumpulan data atau aspirasi melalui Google Form terkait dengan capaian program. Namun, dalam pengisian data dan aspirasi tersebut, Dinas menyatakan mempunyai kendala berupa keterlambatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, hal ini bisa membuat keterlambatan dalam laporan. Hambatan tersebut bisa menjadikan Dinas untuk terjunk ke wilayah yang terdapat kendala.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi partisipatif yang dilakukan oleh Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas digunakan secara praktis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam bentuk pemilihan narasumber atau pemateri yang objektif, menggunakan bank data sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah, mengonfirmasi ulang kepada pemerintah desa ataupun masyarakat terkait dengan karakteristik lokal wilayah, memanfaatkan monitoring dan evaluasi sebagai menilai kendala berupa aspirasi dan data untuk keberlanjutan program.

b. Klaim Ketetapan (Rightness)

Klaim Ketetapan menurut Habermas merupakan klaim tentang penerapan norma-norma sosial. Dalam teori Tindakan Komunikatif klaim ketetapan merupakan klaim yang berkaitan dengan kesesuaian komunikasi dengan norma sosial, etika, dan kesepakatan yang berlaku. Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dalam menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat lokal dan pemerintah desa digunakan untuk mendengarkan pendapat dan aspirasi dari masyarakat lokal. Banyumas sendiri mempunyai bergaman budaya dan adat yang masih berlaku saat ini di beberapa desa. Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan program menyatakan bahwa melakukan pendekatan sesuai dengan karakteristik dan kondisi wilayah tersebut.

Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dalam merancang program selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Salah satu topik utama yaitu, penerapan norma-norma, hukum, dan adat lokal yang berlaku di wilayah tersebut. Dinas membutuhkan verifikasi dan aspirasi dari masyarakat. Hal itu sejalan dengan pernyataan Pemerintah Desa sebagai informan dua dan tiga bahwa Dinas selalu melibatkan pemerintah desa dan masyarakat berkoordinasi mengenai hukum, norma-norma, dan adat yang berlaku.

Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas selalu terbuka akan verifikasi dan kritik dari masyarakat jika perumusan program tidak sesuai dengan hukum, norma-norma, dan adat yang berlaku. Tetapi, Dinas juga menyadari sebagai unsur pemerintahan tidak bisa lepas dari hukum formal. Jika tidak ada kesesuaian antara norma-norma sosial yang berlaku dengan hukum formal, Dinas dan Pemerintah Desa mencari solusi untuk mencapai kesepakatan bersama.

Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas walaupun menjadi fasilitator dalam program pemberdayaan, masyarakat diposisikan sebagai aktor utama dalam program. Masyarakat dan Pemerintah Desa

khususnya mempunyai pandangan sendiri dan lebih paham mengenai nilai norma-norma dan hukum yang berada di wilayahnya. Tetapi, Dinas juga mempunyai peran agar tidak keluar dari batas hukum formal yang berlaku.

c. Klaim Kejujuran (Truthfulness)

Klaim kejujuran merupakan klaim yang berkaitan tentang kesesuaian antara batin dan ekspresi. Klaim kejujuran secara umum merupakan komunikasi yang dibangun oleh komunikator ditandai dengan sejauh mana seseorang menyampaikan niat, sikap, dan pandangan secara jujur dan terbuka sesuai antara batin dan ekspresi. Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas secara terbuka mengakui bahwa mereka membutuhkan masyarakat untuk memverifikasi dan menyampaikan aspirasi.

Bentuk keterlibatan masyarakat ditandai dengan pemberian ruang dialog melalui rapat koordinasi, musyawarah, dan menjadikan masyarakat lokal menjadi sumber informasi utama. Dinas mengaku tidak bisa keseluruhan mengetahui aspek lokal di wilayah tujuan program. Maka dengan itu, perlunya ruang diskusi yang terbuka. Dinas juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat lokal sebagai bahan penyusunan program, hal itu sejalan dengan pernyataan informan dua dan tiga.

Namun, Dinas juga mengaku mempunyai batasan sebagai unsur pemerintah yaitu tentang hukum formal. Pengakuan Dinas tersebut menjadi salah satu unsur Klaim Kejujuran. Maka dari itu, walaupun sebagai fasilitator pemerintah tetapi Dinas menyatakan masyarakat dengan bersifat sejajar. Kerja sama antara pemerintah desa atau masyarakat dengan Dinas sangat dibutuhkan, bukan hanya sebagai subjek pemberdayaan yang hadir.

Komunikasi yang dibangun antara Dinas dengan pemerintah Desa dan Masyarakat sebagai hubungan yang sejajar, dengan berbentuk masyarakat dilibatkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam

program tersebut. Kejujuran dan kepercayaan diantara Dinas dan pemerintah desa ataupun masyarakat tidak hanya meningkatkan kredibilitas melainkan juga memperkuat hubungan diantara keduanya.

d. Klaim Komprehensibilitas

Klaim ini terjadi jika tiga klaim diatas yaitu Klaim kebenaran, klaim ketetapan, dan klaim kejujuran terpenuhi. Klaim Komprehensibilitas diartikan kemampuan untuk menjelaskan dan mencapai kesepakatan atas klaim-klaim lainnya. Dinsospermades Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pastinya mempunyai tujuan dan maksud . Dinas memiliki tujuan masyarakatnya untuk mempunyai rasa untuk berdaya dalam kehidupannya. Dinas menyatakan keberhasilan yang dilakukannya dalam program yang sudah dilaksanakan tidak bisa diukur secara pasti. Namun, diukur lebih kepada dampak sosial dari program tersebut kepada masyarakat.

Dinsospermades Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan program berupaya agar materi atau isi dari program tersebut agar dapat diterapkan dengan kondisi sosial masyarakatnya. Fokus utamanya yaitu kepada kesepahaman bersama. Program dilaksanakan untuk mudah dipahami dan komunikatif.

Dinsospermades Kabupaten Banyumas menempatkan nilai partisipatif, keberdampakan, kesadaran, dan pemberdayaan menjadi indikator utama. Hasil yang didapatkan mungkin tidak langsung, melainkan kepada keberlanjutan dan dampaknya kepada masyarakatnya sendiri. Indikator keberhasilan program secara keseluruhan yang dilakukan oleh Dinas berfokus pada komitmen utama untuk membangun dirinya sendiri dan nilai-nilai yang tumbuh dimasyarakat.

B. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan saran terbagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

1. Bagi Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas
 - a. Dinas selaku fasilitator dalam program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banyumas khususnya, dalam menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan perlunya memperkuat strategi komunikasi partisipatif dengan bentuk menambah intensitas pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat. Upaya perkuat strategi tersebut merupakan unsur yang penting, karena partisipasi masyarakat tidak hanya dilaksanakan pada saat pelaksanaan program melainkan juga pada saat perencanaan dan evaluasi program.
 - b. Dinas sebagai salah satu unsur pemerintah, lebih baik dalam menentukan indikator keberhasilan program terhadap partisipasi masyarakat disusun berdasarkan keberhasilan yang bersifat pasti dan tidak pasti. Hal ini untuk memudahkan proses evaluasi program dan menjadi tolak ukur yang objektif dalam menilai keberhasilan program.
 - c. Perlunya memanfaatkan media sosial atau teknologi informasi lainnya sebagai salah satu media untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas terhadap program pemberdayaan masyarakat. Namun, pemanfaatan forum diskusi tatap muka juga perlu dipertahankan untuk membangun kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat.
2. Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat
 - a. Pemerintah Desa sebagai penghubung antara Dinas dengan Masyarakat diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat pada umumnya seperti, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok perempuan, dan seluruh elemen masyarakat dengan tujuan agar semua lapisan dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mentukan arah program dalam proses pengambilan keputusan.

- b. Perlunya kesadaran terhadap pentingnya partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan kritik yang membangun. Dukungan masyarakat terhadap pemerintah dapat memperkuat terhadap sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
- c. Pembentukan kelompok atau komunitas yang bisa menampung segala aspirasi masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah desa kepada Dinas. Kelompok atau komunitas ini dapat digunakan untuk menampung aspirasi dan mengkoordinasi hubungan antara dinas dengan masyarakat atau pemerintah desa sekaligus. Tujuan pembentukan kelompok dan komunitas ini dapat digunakan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan lebih baik untuk meminimalisir resiko kesenjangan informasi dari Dinas.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menjangkau wilayah yang lebih luas dengan membandingkan strategi komunikasi partisipatif yang dilakukan oleh Dinas pada elemen lapisan masyarakat yang lebih luas. Tujuannya yaitu untuk menilai keberhasilan strategi komunikasi partisipatif yang lebih luas kepada masyarakatnya sendiri.
- b. Penggunaan media sosial atau teknologi komunikasi digital perlu diteliti sebagai salah satu media pendukung komunikasi partisipatif yang dilakukan oleh Dinas. Karena, media sosial atau teknologi komunikasi digital memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama kepada masyarakat yang lebih luas dalam proses program pemberdayaan.
- c. Penggunaan metode penelitian Kuantitatif untuk mengukur dan menilai tingkat partisipasi masyarakat terhadap program yang dilakukan oleh Dinas.